
Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo

Ahmad Zainal Mustofa

Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281

E-mail: m.ahmadzainal@gmail.com

Abstract: *This article discusses the role of the United States in mediating the conflict between Israel and Palestine. The conflict has a long history since Britain took over the Arab region (Palestine) and later recognized the state of Israel. This is opposed by Palestine and the surrounding countries. In response to this, in the Israeli-Palestinian conflict, the US acts as a mediator to reconcile the conflicts between the two countries. The US tried to mediate by making agreements between heads of state such as the Camp David agreement and the Oslo agreement. The Camp David Agreement is a series of efforts to forge an agreement signed by Egyptian President Anwar Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin at Camp David, the historic resting place of the US president. After the Camp David agreement, then the US made the Oslo agreement to reconcile the two countries because the conflict happened again. The Oslo Agreement was signed by Yasser Arafat from the Palestinian side and Yithzak Rabin from the Israeli side in Washington DC, witnessed by Bill Clinton. The Oslo Accords marked the first time Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO) have officially recognized each other.*

Keywords: *Camp David Accord, Israel-Palestine Conflict, Oslo Accords, United States*

Abstract: Artikel ini membahas tentang peran Amerika Serikat dalam menengahi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik tersebut memiliki sejarah yang panjang sejak Inggris mengambil alih wilayah Arab (Palestina) dan kemudian mengakui negara Israel. Hal ini mendapat penentangan dari Palestina dan negara-negara sekitarnya. Menyikapi hal tersebut, Pada konflik Israel-Palestina, AS berperan sebagai mediator untuk mendamaikan konflik kedua negara tersebut. AS mencoba menengahi dengan membuat perjanjian antar kepala negara seperti perjanjian Camp David dan perjanjian Oslo. Perjanjian Camp David merupakan serangkaian upaya membentuk kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin di Camp David, tempat peristirahatan bersejarah presiden Amerika Serikat. Setelah adanya perjanjian Camp David, kemudian AS membuat perjanjian Oslo untuk mendamaikan kembali kedua negara karena konflik kembali terjadi. Perjanjian Oslo ini ditandatangani Yasser Arafat dari pihak Palestina dan Yithzak Rabin dari pihak Israel di Washington DC dengan disaksikan oleh Bill Clinton. Kesepakatan Oslo menandai pertama kalinya Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi mengakui satu sama lain.

Kata kunci: Amerika Serikat, Konflik Israel-Palestina, Perjanjian Camp David, Perjanjian Oslo

PENDAHULUAN

Konflik memang sebuah permasalahan sosial yang sering terjadi dan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan disintegrasi terhadap relasi antar negara, namun juga bisa terjadi pada kelompok masyarakat dari kalangan elit hingga kalangan awam yang bisa merusak hubungan antara kedua pihak atau dengan banyak pihak. Konflik biasa terjadi ketika ada pertemuan dua atau lebih suku bangsa pada suatu wilayah atau dalam suatu pemukiman, sehingga terjadi kontak dan interaksi antar mereka, baik interaksi secara fisik maupun simbol dan psikologis (Herman & Nurdiansa, 2010, p. 155).

Konflik Israel-Palestina dimulai pada akhir abad ke-sembilan belas. Pada tahun 1947, PBB mengadopsi Resolusi 181, yang dikenal sebagai Rencana Pemisahan, yang berusaha membagi Mandat Inggris atas Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Pada 14 Mei 1948, Negara Israel didirikan, yang memicu Perang Arab-Israel pertama (CFR, n.d.). Pada tanggal 15 Mei 1948, mandat Inggris untuk tanah Israel telah kadaluwarsa. Ketika itu dikabarkan terdapat lima tentara Arab menyerbu Israel. Namun diluar dugaan, tentara Israel lebih kuat dan sigap daripada tentara Arab, sehingga Israel mampu memukul mundur tentara Arab yang hendak melakukan penyerbuan terhadap mereka (Amstrong, 2001, p. 136). Perang berakhir pada tahun 1949 dengan kemenangan Israel, tetapi 750.000 warga Palestina mengungsi dan wilayah itu dibagi menjadi 3 bagian: Negara Israel, Tepi Barat (Sungai Yordan), dan Jalur Gaza. Selama tahun-tahun berikutnya, ketegangan meningkat di kawasan itu, khususnya antara Israel dan Mesir, Yordania, dan Suriah. Setelah Krisis Suez 1956 dan invasi Israel ke Semenanjung Sinai, Mesir, Yordania, dan Suriah menandatangani pakta pertahanan bersama untuk mengantisipasi kemungkinan mobilisasi pasukan Israel.

Pada bulan Juni 1967, setelah serangkaian manuver oleh Presiden Mesir

Abdel Gamal Nasser, Israel secara preemptif menyerang angkatan udara Mesir dan Suriah, memulai Perang Enam Hari. Setelah perang, Israel memperoleh kendali teritorial atas Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir; Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania; dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Enam tahun kemudian, dalam Perang Yom Kippur atau Perang Oktober, Mesir dan Suriah melancarkan serangan dua front yang mengejutkan terhadap Israel untuk mendapatkan kembali wilayah mereka yang hilang; konflik tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi Mesir, Israel, atau Suriah, tetapi Presiden Mesir Anwar al-Sadat menyatakan perang sebagai kemenangan bagi Mesir karena memungkinkan Mesir dan Suriah untuk bernegosiasi atas wilayah yang sebelumnya diserahkan (CFR, n.d.).

Di tengah pusaran konflik tak berujung antara Israel dan Palestina, Amerika Serikat hadir sebagai negara yang berupaya memediasi kedua pihak untuk segera berdamai, mengingat AS merupakan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) sehingga mereka mempunyai wewenang sebagai delegasi PBB untuk memediasi konflik tersebut (Rahmatullah, 2015, pp. 49-55). AS berupaya mewujudkan perdamaian dalam konflik Israel dan Palestina melalui beberapa proses, antara lain melalui proses perjanjian Camp David dan Oslo. Kedua hal ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah upaya perdamaian antara Israel-Palestina karena berlangsung secara dramatis dan dilematis sehingga menarik untuk dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam

konflik Israel-Palestina dengan menggunakan literatur berupa buku, artikel, jurnal dan data-data yang relevan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang utuh, baik dari sisi substansial maupun esensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Konflik Israel-Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan suara pada tahun 1947 untuk membagi mandat Palestina Inggris Raya. Mandate tersebut bertujuan untuk membagi negara Yahudi, negara Arab dan Yerusalem merdeka di bawah perwalian PBB (Carter, n.d.). Inggris mengambil alih wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah penguasa bagian Timur Tengah itu, Kekaisaran Ottoman, dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama. Tanah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab. Ketegangan antara kedua bangsa itu tumbuh ketika komunitas internasional memberi Inggris tugas untuk mendirikan "rumah nasional" di Palestina bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi itu adalah rumah leluhur mereka, tetapi orang-orang Arab Palestina juga mengklaim tanah itu dan menentang pemindahan tersebut. Pada tahun 1947, PBB memilih Palestina untuk dibagi menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah, dengan Yerusalem menjadi kota internasional. Rencana itu diterima oleh para pemimpin Yahudi tetapi ditolak oleh pihak Arab dan tidak pernah dilaksanakan.

Pada tahun 1948, karena tidak dapat menyelesaikan masalah, para penguasa Inggris pergi dan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel. Banyak orang Palestina keberatan dan perang pun terjadi. Pasukan dari negara tetangga Arab menyerbu. Pada saat pertempuran berakhir dengan gencatan senjata pada tahun berikutnya, Israel menguasai sebagian besar wilayah. Yordania menduduki tanah yang kemudian dikenal sebagai Tepi Barat, dan Mesir menduduki

Gaza. Yerusalem dibagi antara pasukan Israel di Barat, dan pasukan Yordania di Timur. Karena tidak pernah ada kesepakatan damai dengan masing-masing pihak saling menyalahkan (BBC, n.d.).

Pemicu konflik dari Israel-Palestina sebenarnya berawal dari pembagian tanah oleh Inggris. Mereka membagi tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi mendeklarasikan negara Israel. Di sinilah timbul pergesekan kedua belah pihak. Akibatnya konflik pun tidak dapat dihindarkan. Baik Palestina maupun Israel saling mengklaim bahwa mereka berhak atas pemilikan tanah tersebut.

Perjanjian Camp David

Perjanjian Camp David adalah serangkaian kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin setelah hampir dua minggu mereka melakukan negosiasi rahasia untuk merundingkan perdamaian di Camp David, tempat peristirahatan bersejarah presiden Amerika Serikat. Presiden Jimmy Carter menyatukan kedua belah pihak, dan kesepakatan ditandatangani pada 17 September 1978. Kesepakatan penting itu menstabilkan hubungan yang retak antara Israel dan Mesir, meskipun dampak jangka panjang dari Kesepakatan Camp David masih diperdebatkan (History, n.d.).

Camp David adalah momen penting dalam politik Timur Tengah. Pada bulan September 1978, Israel dan Mesir telah berkonflik selama 30 tahun, dengan ancaman perang malapetaka lain yang membayangi kepemimpinan dan publik. Empat puluh tahun setelah perjanjian itu, hubungan antara Mesir dan Israel—walaupun terbatas—tetap stabil, saling menguntungkan, dan damai. Camp David juga menetapkan preseden penting dalam bagaimana perdamaian Timur Tengah dinegosiasikan dan

bagaimana kepentingan Arab dan Israel harus diperhitungkan dalam proses perdamaian. Sadat dan Begin pada umumnya dapat mengenali minat mereka bersama dan berbagi dalam mengakhiri permusuhan. Mereka juga mampu membangun mekanisme untuk memastikan stabilitas perjanjian—paling penting dalam pengaturan keamanan dan mekanisme pengawasan (Barron, Kurtzer-Ellenbogen, & Yaffe, n.d.).

Kesepakatan Camp David, yang ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin pada September 1978, menetapkan kerangka kerja untuk perjanjian damai bersejarah yang disepakati antara Israel dan Mesir pada Maret 1979. Presiden Carter dan Pemerintah AS berperan peran utama dalam menciptakan peluang terjadinya kesepakatan ini. Sejak awal pemerintahannya, Carter dan Menteri Luar Negerinya, Cyrus Vance, melakukan negosiasi intensif dengan para pemimpin Arab dan Israel, berharap untuk mengadakan kembali Konferensi Jenewa, yang telah didirikan pada Desember 1973 untuk mengakhiri perselisihan Arab-Israel. Ketika Carter dan Vance bertemu dengan para pemimpin individu dari negara-negara Arab dan Israel selama musim semi pada tahun 1977, negosiasi untuk kembali ke Jenewa tampaknya mendapatkan momentum (history.state.gov., Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process, n.d.).

Meski pada awalnya perundingan ini begitu alot dan hampir tidak menemui titik temu, namun pada akhirnya mereka semua bersepakat untuk menyusun kerangka perdamaian di Timur Tengah. kerangka tersebut direalisasikan dengan beberapa agenda berupa: (1) pendirian otonomi Palestina di Tepi Barat dan Gaza, (2) perdamaian Mesir-Israel, (3) perdamaian antara Israel dengan negara Arab lainnya (Fakhriansyah, n.d.).

Meskipun Kesepakatan Camp David meningkatkan hubungan antara Israel dan tetangganya, pertanyaan tentang penentuan nasib sendiri dan

pemerintahan Palestina tetap belum terselesaikan. Pada tahun 1987, ratusan ribu warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza bangkit melawan pemerintah Israel dalam peristiwa yang dikenal sebagai Intifada pertama. Upaya AS memediasi pada perjanjian Camp David ini memang belum memperoleh hasil yang signifikan untuk perdamaian Israel – Palestina, sehingga pecahlah Intifada Pertama. Namun AS sudah berusaha untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dunia sebagaimana tugas yang dipegang oleh AS selaku anggota DK PBB yang salah satu tugasnya adalah menciptakan keamanan dan ketertiban dunia (CFR, n.d.).

Sebagai anggota DK PBB, Amerika Serikat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendamaikan konflik antara Israel-Palestina yang telah berlarut-larut. Maka dari itu, sebagai fasilitator resolusi konflik, Camp David yang berada di Amerika Serikat dijadikan tempat untuk perundingan perdamaian. Perundingan ini pula yang kemudian membuahkan beberapa agenda besar yang berusaha diwujudkan untuk menciptakan harmonisasi politik dalam bingkai perdamaian.

Perjanjian Oslo

Perjanjian Oslo menandai pertama kalinya Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) secara resmi mengakui satu sama lain. Banyak orang pada waktu itu percaya bahwa ini adalah langkah ke arah yang benar. Tetapi apa yang terjadi setelah negosiasi selama 20 tahun berikutnya mengungkapkan bahwa Israel hanya menggunakan perjanjian untuk membenarkan perluasan lebih lanjut pemukiman ilegal di wilayah yang didudukinya pada tahun 1967. Pada tahun 1979, Yasser Arafat meminta Norwegia untuk menyediakan saluran rahasia kembali ke Israel. Namun Israel belum bersedia melakukan

pembicaraan langsung dengan Arafat dan PLO (Interactive.aljazeera., n.d.).

Satu dekade kemudian, Intifada Palestina pecah. Protes besar-besaran mengejutkan baik Israel maupun PLO. Pada tahun 1988, tahun kedua Intifada, Arafat mengumumkan penerimaan PLO atas Resolusi 242 dan 338 PBB, yang memberikan Israel jendela untuk “mengamankan dan mengakui perbatasan”, dan memungkinkannya untuk melanjutkan pendudukannya di bagian-bagian strategis Tepi Barat. Israel juga menghadapi kecaman dunia atas tindakan kerasnya terhadap demonstran Palestina. Ada tekanan yang meningkat dari masyarakat internasional untuk memulai pembicaraan damai dengan Palestina. Israel memutuskan sudah waktunya untuk negosiasi dengan PLO di Norwegia (Interactive.aljazeera., n.d.).

Pada 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Negosiator Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Mahmoud Abbas menandatangani Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara, yang biasa disebut sebagai “Kesepakatan Oslo,” di Gedung Putih. Israel menerima PLO sebagai wakil dari Palestina, kemudian PLO meninggalkan terorisme dan mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai. Kedua belah pihak sepakat bahwa Otoritas Palestina (PA) akan dibentuk dan memikul tanggung jawab pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama periode lima tahun. Kemudian, pembicaraan status permanen tentang masalah perbatasan, pengungsi, dan Yerusalem akan diadakan. Presiden Bill Clinton memainkan peran terbatas dalam mewujudkan Kesepakatan Oslo. Hal tersebut akan menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk membantu Israel dan Palestina mengimplementasikan perjanjian. Pemerintahan Clinton pada awalnya tidak menjadikan perdamaian Israel-Palestina sebagai prioritas. Clinton dan para penasihatnya percaya bahwa terobosan diplomatik di jalur Israel-Suriah akan lebih mungkin terjadi, dan bahwa para

pemimpin Israel akan merasa lebih mudah secara politis untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan daripada mundur dari Tepi Barat. Kesepakatan Israel-Suriah, menurut mereka, juga akan mengarah pada kesepakatan Israel-Lebanon, dan membantu mengisolasi Irak dan Iran, penentang regional utama dari proses perdamaian. Para pejabat AS diberi pengarahan tentang negosiasi rahasia yang telah dimulai Israel dan Palestina di Oslo pada Desember 1992, tetapi tidak banyak berusaha untuk terlibat di dalamnya (history.state.gov., The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process, n.d.).

Kesepakatan Oslo I 1993 menengahi konflik, menyiapkan kerangka kerja bagi Palestina untuk mengatur diri mereka sendiri di Tepi Barat dan Gaza, dan memungkinkan saling pengakuan antara Otoritas Palestina yang baru didirikan dan pemerintah Israel. Pada tahun 1995, Persetujuan Oslo II memperluas perjanjian pertama, menambahkan ketentuan yang mengamanatkan penarikan penuh Israel dari 6 kota dan 450 kota di Tepi Barat (CFR, n.d.).

Perjanjian Oslo mulai memberikan nilai positif dibanding perjanjian Camp David yang berakhir tanpa adanya kesepakatan. Bill Clinton memiliki peran sebagai mediator bagi Israel-Palestina yang berhasil mendudukkan kedua pemimpin negara konflik hingga tercapainya penandatanganan sekaligus berjabat tangan antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin. Namun perjanjian tidak hanya selesai pada Oslo saja, seiring dengan adanya gejolak-gejolak antar kedua negara, maka Amerika Serikat mencari cara untuk meredam ketegangan antara kedua negara. Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat menandatangani kesepakatan Interim Israel-Palestina pada 28 September 1995. Kesepakatan ini menghasilkan perintah bahwa pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan

memberikan otonomi kepada Palestina. Tentu saja dengan *feedback* mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan (internasional.kompas.com, 2012).

Meskipun kesepakatan Oslo sudah jelas tentang terbentuknya otoritas pemerintah Palestina dan mengakui keberadaan Israel, namun salah satu isi kesepakatan Oslo yang lain yaitu menegaskan bahwa Jerusalem dapat dibahas, dirundingkan, pada dasarnya formula penyelesaian masalah Jerusalem tetaplah sama, yakni berdasar pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338, yang tidak menyerukan Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki, termasuk wilayah Jerusalem (Kuncahyo, 2008, p. 277).

Perdamaian adalah salah satu unsur penting bagi kedua belah pihak, maka tidak ada seorangpun yang menuduh pihak lain tidak melakukan sesuatu untuk perdamaian (Husein, 1995, p. 52). Perdamaian bagi Israel dan Palestina menjadi sesuatu yg sangat penting mengingat konflik kedua negara ini nyaris tanpa akhir. Upaya perdamaian yang difasilitasi oleh AS rupanya tidak bisa diterima oleh banyak rakyat Palestina. Hal ini jugalah yang kemudian menyebabkan pecahnya Intifada. Meskipun demikian, adanya perjanjian Oslo I dan Oslo II memberikan harapan baru bagi prospek perdamaian dunia, khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Yithzak Rabin dan Yasser Arafat. Bahkan kedua kepala negara Israel dan Palestina ini menjabat tangan dan sepakat untuk memberikan otonomi untuk Palestina. Kemudian, otoritas Palestina juga mengakui keberadaan Israel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina pada awalnya bermula dari pembagian wilayah oleh Inggris pada tahun 1948. Pembagian wilayah ini

kemudian menjadi masalah karena pihak Israel dan Palestina masing-masing mengklaim bahwa itu merupakan wilayah mereka dan berhak atas wilayah tersebut. Di tengah pusaran konflik ini, Amerika Serikat sebagai delegasi DK PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina berperan besar dalam memediasi kedua negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian Camp David dan perjanjian Oslo. Upaya AS untuk menyelesaikan konflik melalui perjanjian Camp David belum sepenuhnya berhasil karena konflik kedua negara masih berlanjut. Namun dalam perjanjian Oslo, Amerika Serikat berhasil mendudukkan pemimpin kedua negara untuk mencari solusi bersama. Bahkan pada perjanjian Oslo ini antara Yasser Arafat dan Yhitzak Rabin menjabat tangan dan melakukan penandatanganan kesepakatan Interim. Meski hingga kini konflik tersebut masih bergulir dan belum menemui kesepakatan perdamaian, namun pihak Gedung Putih berupaya menciptakan ketenangan dan suasana yang kondusif bagi kedua negara, sehingga permasalahan-permasalahan yang melanda tanah kelahiran agama-agama itu bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, K. (2001). *Perang Suci*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Barron, R., Kurtzer-Ellenbogen, L., & Yaffe, M. (n.d.). *Middle East Peace: What can we Learn from Camp David 40 Years Later?* Retrieved from <https://www.usip.org/publications/2019/03/middle-east-peace-what-can-we-learn-camp-david-40-years-later>
- BBC. (n.d.). *Israel-Gaza violence: The conflict explained*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/newsbeat-44124396>
- Carter, J. (n.d.). *Camp David Accords Egyptian-Israeli history*. Retrieved from <https://www.britannica.com/event/Camp-David-Accords>
- CFR. (n.d.). *Israeli-Palestinian Conflict*.

- Retrieved from
<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/israeli-palestinian-conflict>
- Fakhriansyah, M. (n.d.). *Perjanjian Camp David dan Pergolakan Timur Tengah Tak Kunjung Reda*. Retrieved from <https://amp.tirto.id/perjanjian-camp-david-dan-pergolakan-timur-tengah-tak-kunjung-reda-gbvp>
- Herman, & Nurdiansa. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 150-165.
- History. (n.d.). *Camp David Accords*. Retrieved from <https://www.history.com/topics/middle-east/camp-david-accords>
- history.state.gov. (n.d.). *Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. Retrieved from <https://history.state.gov/milestones/1977-1980/camp-david>
- history.state.gov. (n.d.). *The Oslo Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. Retrieved from <https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo>
- Husein, H. (1995). *Prospek Perdamaian Di Timur Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Interactive.aljazeera. (n.d.). *Oslo accord: the full story and all the secret*. Retrieved from <https://interactive.aljazeera.com/aje/palestineremix/the-price-of-oslo.html#/14>
- internasional.kompas.com. (2012, November 30). *Dari Camp David hingga Perjanjian Oslo*. Retrieved from <http://www.internasional.kompas.com>
- Kuncahyo, T. (2008). *Jerusalem: Kesucian, Konflik dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Kompas.
- Rahmatullah. (2015). Peran Amerika Serikat dalam Menciptakan Perdamaian dan Penyelesaian Konflik Israel dan Palestina. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(1), 45-60.